



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 287 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Badan Pengawas ...

3. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi atau perangkat daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Maturitas SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada Tanggal 2 Agustus 2023

o/a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Kosmas
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kupang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 287 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 2 Agustus 2023

TENTANG PENGARAH DARI TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
3	4	4
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim dalam pelaksanaan tugas.

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Kosmas
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 287/KEP/HK/2023****TANGGAL : 2 Agustus 2023**

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Penilaian Mandiri	a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan e. melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

3. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	Mengoordinir semua Asesor tingkat Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas.
a. Bidang Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT	Ketua Bidang/Wakil Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	a. menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah; b. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah; c. menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; d. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; e. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan f. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Prov. NTT		
4	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada Bappelitbangda Prov. NTT		
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Prov. NTT		
6	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Prov. NTT		
7	Yeremi Theofilus Isu, S.E./Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda Prov. NTT	Asesor Pemda	

b. Bidang Keandalan Pelaporan Keuangan			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Ketua Bidang/Wakil Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	a. menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah; b. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; c. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan d. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
4.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
5.	Hilarius B.C.Da Silva, S.E., M.Ec.Dev/Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Asesor Pemda	
c. Bidang Pengamanan atas Aset Daerah			
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Ketua Bidang/Wakil Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	a. menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian; b. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan; c. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan d. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		

5.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
6.	Marcel F. Elim, S.T/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Asesor Pemda	

d. Bidang Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Bidang/Wakil Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	<p>a. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;</p> <p>b. mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait</p> <p>c. melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;</p> <p>d. menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan</p> <p>e. bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
3.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
4.	Bernandus Lodoweyk Kedang, S.S.T.P.,M.M/Auditor Ahli Muda/Asesor Pemda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Asesor Pemda	

4. Asesor Tingkat Perangkat Daerah

a. Inspektorat

1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p>
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
4.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
5.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
6.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		

7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
8.	Marthen Ly, S.E/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
9.	Hendro Nugroho Onesimus Gumay, S.E/Perencana pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
10.	Fahmi R. Baletty, S.IP/ PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Asesor PD	

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT	Koordinator	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Mariano Sabinus Tefa, S.S.T.P., M.M/Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Prov. NTT		<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p>
4.	Christoforus C. D. Amironi, SE/Fungsional Umum pada Bappelitbangda Prov. NTT	Anggota	
5.	Emanuel Tokan Ola Masan (Fungsional Umum)		
6.	Alvian Adi Dharma, S.T/Fungsional Umum pada Bappelitbangda Prov. NTT		
7.	Penina Lambai, S.Sos/Fungsional Umum pada Bappelitbangda Prov. NTT	Asesor PD	

c. Badan Keuangan Daerah			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;</p> <p>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p>
2.	Sekertaris Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Asesor PD	

d. Badan Pendapatan dan Aset Daerah

1.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
7.	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
8.	Kasubid. Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
9.	Kasubid Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
10.	Kasubid Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		

11.	Kasubid Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
12.	Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
13.	Kasubid. Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
14.	Eugene Cornelis, SE/Analisis Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
15.	Jacobus Makin, ST.,M.Ec.Dev/Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
16.	Natalia Th.F.Saba, S.Sos.,M.M/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT		
17.	Kristoforus R. Hayong, S.Kom.,M.M/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Asesor PD	<ul style="list-style-type: none"> a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT		
6.	Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT		
7.	Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT		
8.	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT		
9.	Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT		
10.	Wahyu Rismawati, SP/ Staf pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Prov. NTT	Asesor PD	

f. Dinas Peternakan

1.	Kepala Dinas Peternakan Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun PD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Sekretaris Dinas Peternakan Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, dan Penyuluhan pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Agribisnis pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
7.	Rambu Marisa Agustine, SE, MM/Perencana Ahli Muda pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Asesor PD	
8.	Jenita L. H. Giri, S.Kom, M.Si/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
9.	Rambu Marisa Agustine, SE, MM/Perencana Ahli Muda pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
10.	Asniati S. A. Amalo, S.Pt., M.Si/Perencana Ahli Madya pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
11.	Ir.Margaritha a. V. Tabelak/Penyuluh Pertanian Ahli Madya pada Dinas Peternakan Prov. NTT		

12.	Ir.Matilda Sadipun, M.Si./Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Asesor PD	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun PD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
13.	Jonathan A. Tamoos, S.Pt., M.Si/Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
14.	Immanuel Agustinus I.Ottu, S.Pt/Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
15.	Maria Dolorosa Fenge, S.Pt/Kepala Seksi Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
16.	Ir.Grees O. H. Reteng/Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
17.	drh. Marlina Mukhlis/Medik Veteriner Ahli Muda pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
18.	Jupliana Mboro, S.Pt /Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
19.	Yunita W. Subang, S.Pt/Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
20.	drh. Konny Marlina Zesi/Medik Veteriner Ahli Muda pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
21.	Frederika A. Allung, S.Pt./Fungsional Umum pada Dinas Peternakan Prov. NTT		

22.	Maria S. Lenga, S.Pt., M.Sc/Fungsional Umum pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
23.	Yeni M. Deru, S.Pt/Fungsional Umum pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
24.	Opamina Taneo, S.Pt/Fungsional Umum pada Dinas Peternakan Prov. NTT		
25.	Gabriel Manoe, SE/Fungsional Umum pada Dinas Peternakan Prov. NTT		

g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah; b. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP; c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Sekretaris Dinas Ling- kungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Penataan Dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengen- dalian Dan Perlindungan pa- da Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang Pening- katan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Dan Perhutanan Sosial pada Dinas Ling- kungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT		

7.	Abriyanto F. Lapenangga, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Asesor PD	
h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Koordinator	<p>a. Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. Menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP</p> <p>c. Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;</p> <p>d. Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pemasaran Pa- riwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Industri Pari- wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang Destinasi pari- wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata pada Dinas Pari- wisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Kepega- waan dan Umum pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT		
8.	Eriftora Kolimon, S.IP. M.Si/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Pari- wisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT		
9.	Eduarduk Manek, S.T., M.T /Perencana Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

	Prov. NTT		
10.	Rendra Agusti Abidin, S.Kom/Staf pada Dinas Pari- wisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Koordinator	
i. Dinas Sosial			
1.	Kepala Dinas Sosial Prov. NTT	Koordinator	<p>a. Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. Menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP</p> <p>c. Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;</p> <p>d. Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p>
2.	Sekretaris Dinas Sosial Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Pem- berdayaan Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas So- sial Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang Perlin- dungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT		
7.	Fruementius Dopo Puu, S.Sos/Analisis Perencanaan Anggaran pada Dinas Sosial Prov. NTT		
8.	Shandra Diana Isliko, S.Si- Teol., M.A./Staf pada Dinas Sosial Prov. NTT	Asesor PD	

j. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT		
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT	Asesor PD	

8.	Emerensiana Kette, SKM, M.Kes/Plt. Sub Koordinator PDE pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asesor PD	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
9.	Yelsi Nurman Polin, S.Si/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
10.	Rasnawati, SKM/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
11.	Ni Made Oka Arpini Kusuma, SP, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
12.	Apris Lemo Isu, SKM, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
13.	Celestiana A. Suku Say, A.Md/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
14.	Derty Koroh,SKM,MPH/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang OP SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		
7.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		
8.	Kepala Bidang PRKP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		
9.	Dra. Fintje F. Djami/Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		
10.	Romaldus Bala Keraf/Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	Asesor PD	

1. Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1.	Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.</p>
2.	Sekretaris Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT		
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT		
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT		
9.	Intan N. S. Markus, S.P/Staf pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT		

10.	Merliyansi Rambu Anameha, S.T/Staf pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Trans- migrasi Prov. NTT	Anggota	
11.	Johana Hermina Djoka, S.E/Staf pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Trans- migrasi Prov. NTT	Asesor PD	
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1.	Kepala Dinas Pem- berdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;</p> <p>b. menilai Struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan</p> <p>d. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p>
2.	Sekretaris Dinas Pem- berdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang I pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang II pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT		
5.	Kepala Bidang III pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT		
6.	Kepala Bidang IV pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT		
7.	Kepala Sub Koordinator Perencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT		
8.	Chrisantus Reynaldi Diding, S.STP/Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT	Asesor PD	

5. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas			
	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor PD dalam rangka perbaikan draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan</p> <p>b. mengoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.</p>
6. Tim Penjaminan Kualitas			
1.	Frans Bin, S.E., M.M/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Wakil Koordinaator	<p>a. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor PD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan</p> <p>b. melakukan penyusunan surat pernyataan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.</p>
2.	Linda Triono, S.E.,M.Hum/Plh. Analisis dan Evaluasi/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
3.	Alfrids Sabuin, S.Pt/PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
4.	Jose Alves Pereira, S.H/PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
5.	Christiana M. Agamitte, S.Sos, M.M/PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
6.	Isharyanto, S.H/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
7.	Nur Aini, A.Md/Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		

8.	Cristoforus L. Amol, S.T/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
7. Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi			
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Prov. NTT	Koordinator	<p>a. Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);</p> <p>b. Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;</p> <p>c. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam, pengoperasian aplikasi; dan</p> <p>d. Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur</p>
2.	Hendro Nugroho Onesimus Gumay, S.E/Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3.	Astrid Octaviana Asy, S.E/Auditor Pertama Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
4.	Stephanie Devina Agustin Hake, S.Ak/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
5.	Fahmi R. Baletty, S.I.P/PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
6.	Jose Avilio Billik, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
8. Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah			
1.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;</p> <p>b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.</p>
2.	Marthen Ly, S.E /Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Wakil Koordinator	

3.	Selviana Tea, S.E./Auditor Inspektorat NTT	Krispina pada Daerah Prov. NTT	Anggota	<p>a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;</p> <p>b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.</p>
4.	Veronika S.Sos/Auditor Inspektorat NTT	Angelina Muda Daerah Prov. NTT		
5.	Tridia M. Y. Pertama Daerah Prov. NTT	Gawu, SS/Auditor pada Inspektorat		
6.	Richardus Dumin, S.E/Auditor pada Daerah Prov. NTT	Jaya Pertama Inspektorat		
7.	Quinn S.AP/PPUPD pada Daerah Prov. NTT	Amelienda Ahli Inspektorat		
8.	Robertus Inspektorat NTT	R. Penyelia Daerah Prov. NTT		
9.	Yesron Inspektorat NTT	A Umum Daerah Prov. NTT		

o a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

Kosmas
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196509271990111004